

FNKSDA YOGYAKARTA SEBAGAI AKTOR INTERMEDIARY (Membangun Soliditas Internal Organisasi)

Hana Setyaningsih¹, Yudi Rusfiana², Agus Nurulsyam Suparman³, Hendi Budi Aman⁴

¹Universitas Gadjah Mada, Indonesia, ²IPDN Jatinangor, Indonesia, ^{3,4}Universitas Galuh, Indonesia.

E-mail: hanasetyaningsih@mail.ugm.ac.id¹, yudirusfiana@ipdn.ac.id², agusnurulsyams@gmail.com³,
hendi_budi Aman@unigal.ac.id⁴.

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis soliditas internal aktor intermediary, yaitu Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) di Yogyakarta, dalam memperjuangkan isu keadilan agraria dan kedaulatan sumber daya alam. FNKSDA hadir sebagai respons atas meningkatnya konflik agraria yang berdampak pada warga Nahdliyin, sekaligus sebagai bentuk kritik terhadap melemahnya sikap kritis organisasi keagamaan arus utama dalam merespons persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan tahapan data condensation, data display, serta drawing and verifying conclusions. Hasil penelitian menunjukkan bahwa soliditas internal FNKSDA dibangun melalui mekanisme pengkaderan Pesantren Agraria yang berfungsi sebagai ruang pembentukan ideologi, kesadaran politik, dan komitmen kolektif anggota. Dalam proses tersebut, Aswaja dan sosialisme dijadikan sebagai pilar utama yang menyatukan identitas keislaman dan semangat perjuangan keadilan sosial. Selain itu, sikap independen FNKSDA yang menolak pendanaan dari pihak eksternal turut memperkuat kohesi internal serta menjaga otonomi gerakan dari intervensi luar. Dengan demikian, soliditas internal menjadi modal penting bagi FNKSDA dalam menjalankan perannya sebagai aktor intermediary secara konsisten dan berkelanjutan.

Kata kunci: aktor intermediary; soliditas internal; FNKSDA; Pesantren Agraria; Aswaja dan sosialisme.

FNKSDA YOGYAKARTA AS AN INTERMEDIARY ACTOR (Building Internal Organizational Solidity)

ABSTRACT. This study aims to analyze the internal solidity of an intermediary actor, namely the Nahdliyin Front for Natural Resource Sovereignty (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam/FNKSDA) in Yogyakarta, in advocating agrarian justice and natural resource sovereignty. FNKSDA emerged as a response to the escalation of agrarian conflicts affecting Nahdliyin communities, as well as a form of critique toward the weakening critical stance of mainstream religious organizations in addressing such issues. This research employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews and literature review. Data analysis was conducted through the stages of data condensation, data display, and drawing and verifying conclusions. The findings indicate that FNKSDA's internal solidity is constructed through the cadre formation mechanism of the Pesantren Agraria, which functions as a space for shaping ideology, political consciousness, and collective commitment among members. In this process, Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) and socialism serve as the main pillars that integrate Islamic identity with the spirit of social justice struggle. Moreover, FNKSDA's independent stance in rejecting external funding further strengthens internal cohesion and safeguards the movement's autonomy from external intervention. Thus, internal solidity constitutes a crucial asset for FNKSDA in sustaining its role as an intermediary actor in a consistent and enduring manner.

Keywords: intermediary actor; internal solidity; FNKSDA; Pesantren Agraria; Aswaja and socialism.

LATAR BELAKANG

Setelah Indonesia merdeka, perjuangan di bidang agraria menjadi salah satu isu penting dalam proses pembentukan dan penguatan negara. Dalam konteks tersebut, kalangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran dalam perumusan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Perhatian NU terhadap persoalan agraria sesungguhnya telah tercermin sejak periode awal organisasi ini berdiri. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui Anggaran Dasar NU tahun 1930 yang menegaskan salah satu tujuan organisasi, yaitu

“mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian dan perniagaan jang tiada dilarang oleh sjara’ agama Islam” (Bruinessen dalam Nashirulhaq, 2017).

Isu sumber daya alam dalam perkembangannya semakin memperoleh perhatian dari kalangan pemuda Nahdlatul Ulama (NU), khususnya seiring meningkatnya konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak langsung pada masyarakat pedesaan. Perhatian ini muncul sebagai respons atas berbagai praktik penguasaan lahan dan sumber daya yang dinilai tidak adil serta merugikan warga Nahdliyin di tingkat akar rumput. Namun demikian, kedekatan posisi dan praktik politik NU dengan kekuasaan politik praktis kerap dipersepsikan menyebabkan terjadinya pergeseran orientasi perjuangan organisasi dari kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan kritik internal, terutama dari kalangan muda NU, terhadap melemahnya sikap kritis organisasi dalam merespons konflik agraria. Meskipun demikian, pergeseran perhatian tersebut tidak berlangsung secara menyeluruh, karena masih terdapat elemen-elemen di dalam NU yang secara konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap isu-isu keadilan sosial dan kedaulatan sumber daya alam.

Kondisi tersebut kemudian melatarbelakangi lahirnya sebuah front gerakan sebagai respons atas berbagai persoalan sumber daya alam dan agraria yang menimpa warga Nahdliyin. Front tersebut secara resmi didirikan pada 8 Desember 2013 di Jombang dan dikenal dengan nama Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Meskipun FNKSDA memiliki keterkaitan historis dan kultural yang kuat dengan Nahdlatul Ulama, organisasi ini pada praktiknya bukan merupakan organisasi sayap maupun badan otonom NU (Nashirulhaq, 2017; Widayati, 2019). Penggunaan istilah “Nahdliyin” dalam nama FNKSDA lebih dimaknai sebagai pilihan diksi yang merepresentasikan identitas kultural dan semangat kebangkitan, bukan sebagai penanda hubungan struktural kelembagaan dengan NU. Hal ini ditegaskan oleh tidak adanya relasi formal atau struktural antara FNKSDA dan NU, meskipun para pendiri serta sebagian besar anggotanya berasal dari kalangan aktivis muda NU.

Anggota FNKSDA memaknai istilah “Nahdliyin” sebagai bentuk pengartikulasian ulang identitas, yang tidak merujuk secara langsung pada keanggotaan formal dalam Nahdlatul Ulama. Istilah tersebut dipahami secara lebih substantif sebagai representasi makna kebangkitan, yakni orang-orang yang bangkit dan bergerak melawan ketidakadilan struktural. Pemaknaan ini menempatkan “Nahdliyin” sebagai subjek sosial yang aktif, kritis, dan memiliki kesadaran politik terhadap persoalan sumber daya alam. Dengan demikian, identitas Nahdliyin dalam FNKSDA bersifat inklusif dan terbuka, tidak dibatasi oleh afiliasi kelembagaan NU. Pemaknaan ulang ini sekaligus menjadi dasar ideologis bagi FNKSDA dalam membangun solidaritas gerakan lintas latar belakang.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan gerakan dan keutuhan organisasi, FNKSDA membutuhkan soliditas internal yang kuat dan berkelanjutan. Soliditas internal tersebut menjadi prasyarat penting bagi organisasi dalam mempertahankan konsistensi ideologis, efektivitas gerakan, serta kapasitasnya sebagai aktor intermediary dalam memperjuangkan kedaulatan sumber daya alam. Tanpa soliditas internal yang memadai, tujuan organisasi berpotensi mengalami fragmentasi dan kehilangan arah perjuangan. Dengan demikian, penting untuk menelaah bagaimana FNKSDA membangun dan menjaga soliditas internal organisasinya. Fokus inilah yang kemudian menjadi perhatian utama dalam penelitian ini.

KAJIAN TEORITIS

Aktor intermediary merupakan aktor yang berperan sebagai penghubung antara negara dan masyarakat, khususnya dalam konteks relasi kekuasaan dan distribusi sumber daya (Anggraeny, 2017). Keberadaan aktor ini menjadi penting dalam sistem politik dan sosial yang ditandai oleh ketimpangan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan. Aktor intermediary tidak hanya berfungsi sebagai perantara komunikasi, tetapi juga sebagai representasi kepentingan kelompok-kelompok sosial yang berada di luar lingkaran kekuasaan formal. Melalui peran tersebut, aktor intermediary berkontribusi dalam memperkuat posisi tawar masyarakat terhadap negara. Dengan demikian, aktor ini memiliki signifikansi strategis dalam mendorong terciptanya tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif.

FNKSDA YOGYAKARTA SEBAGAI AKTOR INTERMEDIARY

(Membangun Soliditas Internal Organisasi)

(Hana Setyaningsih, Yudi Rusfiana, Agus Nurulsyam Suparman, Hendi Budiaman)

Lebih lanjut, aktor intermediary menjalankan fungsinya dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak masyarakat melalui berbagai saluran, baik lembaga elektoral maupun non-elektoral (Rahmatullah & Jabbar, 2023). Pada ranah elektoral, peran tersebut dapat diwujudkan melalui advokasi kebijakan dan pengaruh terhadap proses politik formal. Sementara itu, pada ranah non-elektoral, aktor intermediary kerap terlibat dalam gerakan sosial, pendidikan politik, serta pendampingan masyarakat. Strategi non-elektoral ini memungkinkan aktor intermediary untuk menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dari mekanisme politik formal. Dengan kombinasi kedua jalur tersebut, aktor intermediary mampu memperluas ruang partisipasi masyarakat sekaligus menekan negara agar lebih responsif terhadap tuntutan keadilan sosial.

Meskipun demikian, sebagian besar riset mengenai aktor *intermediary* masih berfokus pada fungsi dan peran eksternal aktor tersebut dalam merepresentasikan kelompok marjinal dan memperjuangkan pengakuan kebijakan. Putra (2015), misalnya, menunjukkan bahwa strategi aktor *intermediary* dalam mempertahankan keberadaannya dilakukan melalui kompromi politik, pembangunan relasi, serta pembentukan citra positif di hadapan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks yang sama, studi Ham dan Elan (2024) menegaskan bahwa Vinolia Wakijo sebagai aktor *intermediary* menggunakan strategi perjuangan sosial dan politik untuk memperjuangkan pengakuan terhadap waria sebagai gender ketiga. Selain itu, penelitian Abbas dan Shintasari (2016) mengkaji peran aktor *intermediary* dalam advokasi kebijakan, dalam memperjuangkan pengesahan Peraturan Daerah Jaminan Kesehatan bagi difabel di Kota Yogyakarta. Studi-studi tersebut memperlihatkan bahwa aktor *intermediary* berperan penting dalam menjembatani kepentingan kelompok marjinal dengan struktur kekuasaan dan proses pembuatan kebijakan. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih minim dalam membahas dinamika internal organisasi aktor *intermediary*, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme perekrutan anggota dan pembentukan solidaritas internal sebagai basis keberlangsungan dan kekuatan organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus akan berfokus pada aspek internal organisasi aktor *intermediary* sebagai celah yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang dibangun oleh individu maupun kelompok dalam merespons persoalan sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan asumsi bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data agar sesuai dengan tujuan penelitian, penyajian data bertujuan untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar temuan, sementara penarikan serta verifikasi kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keabsahan dan konsistensi temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekrutmen dan Pengkaderan dalam FNKSDA

Pengkaderan merupakan suatu sistem yang di dalamnya berlangsung proses penanaman nilai, norma, dan orientasi moral kepada sumber daya manusia dalam organisasi, dengan tujuan menjaga keberlanjutan organisasi sekaligus memastikan tercapainya tujuan kolektif yang telah ditetapkan (IGI, 2019). Dalam konteks

FNKSDA YOGYAKARTA SEBAGAI AKTOR INTERMEDIARY

(Membangun Solidaritas Internal Organisasi)

(Hana Setyaningsih, Yudi Rusfiana, Agus Nurulsyam Suparman, Hendi Budiaman)

organisasi, pengkaderan tidak hanya dipahami sebagai proses teknis pembelajaran, melainkan juga sebagai mekanisme strategis untuk membentuk cara pandang, sikap, dan komitmen anggota terhadap visi dan nilai perjuangan organisasi. Oleh karena itu, pengkaderan umumnya menjadi tahapan lanjutan yang krusial setelah proses perekrutan calon anggota, karena melalui proses inilah organisasi melakukan seleksi ideologis dan pembentukan identitas kolektif.

Dalam kelompok *intermediary* seperti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), yang bergerak dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat akar rumput, pengkaderan memiliki posisi yang sangat penting. FNKSDA tidak sekadar merekrut individu untuk bergabung secara administratif, melainkan melalui tahapan tertentu untuk membentuk anggota yang memiliki kesadaran politik, keberpihakan sosial, serta komitmen terhadap agenda advokasi yang diperjuangkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Noeleen Heyzer yang menyatakan bahwa peran aktor *intermediary* salah satunya diwujudkan melalui upaya membela dan memberdayakan masyarakat di tingkat bawah (Haryanto et al., 2013). Dengan demikian, pengkaderan dalam FNKSDA dapat dipahami sebagai instrumen utama dalam menyiapkan aktor-aktor yang tidak hanya mampu menjembatani kepentingan masyarakat dengan struktur kekuasaan, tetapi juga memiliki solidaritas dan kesadaran kolektif sebagai basis gerakan organisasi.

Perekrutan anggota FNKSDA dilakukan melalui dua media pendekatan utama, yaitu melalui media sosial dan jaringan sosial. Pemanfaatan media sosial bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi organisasi serta menarik minat calon anggota dari berbagai latar belakang. Sementara itu, perekrutan melalui jaringan dilakukan melalui kebiasaan FNKSDA dalam menyelenggarakan lingkaran diskusi yang diadakan secara rutin setiap minggu dan bersifat terbuka untuk umum. Ruang diskusi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pertukaran gagasan mengenai isu-isu sumber daya alam dan keadilan sosial, tetapi juga menjadi medium awal perjumpaan antara organisasi dengan individu-individu yang memiliki ketertarikan serupa.

Melalui forum-forum diskusi tersebut, secara tidak langsung muncul simpatisan yang kemudian menunjukkan minat untuk bergabung dengan FNKSDA. Dalam konteks ini, proses perekrutan berlangsung secara informal dan dikenal dengan istilah Pancing Dikit Curhat (PDC). Sistem ini dilakukan melalui perbincangan awal yang bersifat cair dan personal, di mana pengurus atau anggota FNKSDA menggali pandangan, ketertarikan, serta kepedulian calon anggota terhadap isu-isu yang diperjuangkan organisasi. Melalui mekanisme ini, FNKSDA tidak hanya menilai kesesuaian calon anggota secara administratif, tetapi juga memastikan adanya keselarasan nilai dan orientasi perjuangan sebelum seseorang secara resmi menjadi bagian dari organisasi.

Dalam Himpunan Musyawarah Nasional (Munas) FNKSDA III disebutkan bahwa struktur keanggotaan FNKSDA terdiri atas dua kategori, yakni anggota dan kader. Anggota didefinisikan sebagai setiap individu yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk bergabung, menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta menyetujui program perjuangan FNKSDA. Keanggotaan pada tahap ini menunjukkan bentuk keterlibatan awal individu dalam organisasi, yang belum sepenuhnya menuntut kecakapan ideologis maupun metodologis secara mendalam, tetapi telah menegaskan kesediaan untuk terikat pada nilai dan arah perjuangan organisasi.

Sementara itu, kader merupakan anggota yang telah mengikuti Pesantren Agraria (PA), yaitu proses kaderisasi yang dirancang untuk memperkuat kapasitas ideologis dan metodologis anggota FNKSDA. Dalam Pesantren Agraria, peserta dibekali berbagai materi yang bertujuan membangun pemahaman kritis terhadap isu-isu agraria, sumber daya alam, serta strategi gerakan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil Munas FNKSDA III yang merupakan munas terbaru, belum terdapat ketentuan mengenai standar minimal materi kaderisasi yang harus dipenuhi secara seragam. Setelah mengikuti Pesantren Agraria, kader menjalani proses tindak lanjut melalui kegiatan bedah jurnal, di mana setiap kader diwajibkan memilih satu bundel jurnal untuk dipresentasikan dan didiskusikan dalam forum kolektif. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan pelibatan kader dalam kerja-kerja biro, yang berfungsi sebagai ruang praktik untuk mengintegrasikan pemahaman teoritis dengan pengalaman organisatoris secara langsung.

Lebih lanjut, dalam struktur kader FNKSDA terdapat pembagian ke dalam dua kategori, yaitu pegiat dan jama'ah. Pegiat merujuk pada kader yang secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi serta menjalankan peran kepengurusan dalam struktur FNKSDA. Kategori ini umumnya mencakup individu-individu yang tidak hanya mengikuti proses kaderisasi, tetapi juga terlibat secara berkelanjutan dalam kerja-kerja organisasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan program, maupun aktivitas advokasi di lapangan.

Sementara itu, jama'ah adalah kader yang telah mengikuti proses pengkaderan, namun keterlibatannya dalam kegiatan dan gerakan FNKSDA bersifat terbatas. Pada umumnya, jama'ah tidak terlibat langsung dalam struktur kepengurusan organisasi dan memiliki intensitas partisipasi yang lebih rendah dibandingkan pegiat. Kelompok ini sering kali terdiri dari individu-individu yang bergabung dengan FNKSDA karena kedekatan dengan isu tertentu, seperti mereka yang terdampak konflik agraria, tetapi memilih untuk tidak atau belum terlibat secara aktif dalam pengelolaan organisasi. Pembagian kategori kader ini menunjukkan adanya diferensiasi tingkat keterlibatan dalam FNKSDA, yang sekaligus mencerminkan fleksibilitas organisasi dalam mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi anggota (Nashirulhaq, 2017).

Landasan pemikiran organisasi FNKSDA tercermin secara jelas dalam materi-materi yang diberikan selama proses pengkaderan, khususnya melalui kajian "Analisis Ekonomi-Politik Kapitalisme" dan "Fiqh Agraria". Kedua materi tersebut berfungsi sebagai kerangka ideologis untuk membangun kesadaran kritis kader terhadap struktur ketimpangan ekonomi-politik yang melingkupi persoalan agraria, sekaligus sebagai dasar normatif dalam memaknai perjuangan sosial dari perspektif keislaman. Melalui penguatan pemahaman tersebut, pengkaderan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas analitis kader, tetapi juga untuk memperkuat keimanan sebagai basis etis dalam melawan berbagai bentuk ketertindasan.

Dalam konteks ini, FNKSDA mempertahankan corak "keislaman" sebagai stimulan ideologis yang menyatu dengan semangat perjuangan organisasi. Nilai-nilai keislaman tidak ditempatkan secara simbolik semata, melainkan dijadikan sebagai sumber legitimasi moral dan motivasi kolektif dalam memperjuangkan keadilan agraria dan kedaulatan sumber daya alam. Dengan demikian, pengkaderan di FNKSDA tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang internalisasi nilai dan pembentukan solidaritas ideologis yang menopang keberlanjutan gerakan organisasi.

Pilar-Pilar dalam Menjaga Solidaritas

Dalam Himpunan Dokumen Hasil Musyawarah Nasional Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) III, tercantum sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan ideologis dan etis organisasi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah serta cita-cita pembebasan kaum mustadh'afin (kaum lemah) yang diletakkan dalam bingkai sosialisme ilmiah. Landasan ini tidak hanya berfungsi sebagai arah perjuangan FNKSDA, tetapi juga menjadi basis normatif dalam membangun dan menjaga solidaritas internal antaranggota organisasi.

Dalam praktiknya, nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah diwujudkan melalui apa yang disebut sebagai Aswaja material, yang menjadi salah satu pilar penting dalam kehidupan organisasi FNKSDA. Aswaja material memuat ajaran lima tujuan syariah (maqāsid al-syarī'ah), yakni menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), menjaga akal (ḥifẓ al-'aql), menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan menjaga harta benda (ḥifẓ al-māl). Kelima prinsip tersebut menjadi kerangka etis yang membimbing relasi antaranggota, cara pandang terhadap perjuangan sosial, serta orientasi keadilan yang dikembangkan dalam FNKSDA. Dengan menjadikan maqāsid al-syarī'ah sebagai pijakan bersama, solidaritas dalam organisasi tidak hanya dibangun atas dasar kesamaan kepentingan politik, tetapi juga atas kesadaran moral dan nilai keagamaan yang dipahami secara material dan kontekstual.

Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) FNKSDA III, organisasi ini merumuskan sejumlah tujuan utama yang menjadi arah perjuangan kolektif. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

1. Mewujudkan cita-cita pembebasan kaum mustadh'afin (orang-orang yang tertindas dan lemah).
2. Memperkuat dan mendukung perjuangan demokrasi dan anti-kapitalisme di Indonesia.
3. Mewujudkan kedaulatan rakyat dengan semangat keadilan sosial-ekologis.

FNKSDA YOGYAKARTA SEBAGAI AKTOR INTERMEDIARY

(Membangun Solidaritas Internal Organisasi)

(Hana Setyaningsih, Yudi Rusfiana, Agus Nurulsyam Suparman, Hendi Budiaman)

4. Membangun kesadaran dan kepekaan masyarakat terhadap setiap bentuk penjajahan dan penindasan.

Dalam konteks tersebut, sosialisme dan Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) dijadikan sebagai pilar sekaligus kompas ideologis organisasi. Kedua pilar ini dipahami sebagai fondasi perjuangan kelas yang berkarakter keislaman, di mana nilai-nilai keagamaan dipadukan dengan analisis struktural terhadap ketimpangan ekonomi-politik. Kerangka ini membentuk cara FNKSDA berinteraksi, baik dengan sesama aktor *intermediary*, masyarakat akar rumput, maupun negara. Untuk menjaga konsistensi ideologis dan independensi gerakan, FNKSDA secara tegas tidak menerima dana dari pihak luar. Sikap ini didasarkan pada pandangan bahwa sumber pendanaan berpotensi menjadi alat pengikat yang dapat memengaruhi arah dan agenda perjuangan organisasi.

Lebih jauh, FNKSDA memaknai Aswaja sebagai seperangkat nilai universal yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang berfungsi sebagai landasan etis dalam memperjuangkan keadilan. Sementara itu, sosialisme diposisikan sebagai ikhtiar politik untuk membela kepentingan kelas tertindas dengan tujuan mengakhiri ketimpangan sosial yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut, FNKSDA mengorientasikan perjuangannya pada pencapaian keadilan sosial-ekonomi, khususnya dalam relasi antara kelas kapitalis yang menguasai sumber daya dan kelas proletar yang mengalami eksploitasi. Kerangka ideologis inilah yang kemudian menjadi perekat solidaritas internal sekaligus penopang keberlanjutan gerakan organisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengkaderan dalam Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) merupakan elemen kunci dalam membangun dan menjaga soliditas internal organisasi sebagai aktor *intermediary*. Proses pengkaderan yang dilakukan melalui Pesantren Agraria tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang internalisasi nilai, pembentukan kesadaran ideologis, dan penguatan komitmen kolektif anggota terhadap agenda perjuangan FNKSDA. Melalui tahapan ini, FNKSDA berupaya memastikan bahwa kader yang terbentuk memiliki kecakapan ideologis dan metodologis yang sejalan dengan arah gerakan organisasi.

Lebih lanjut, temuan penelitian memperlihatkan bahwa pilar Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) dan sosialisme menjadi fondasi utama dalam membangun solidaritas internal FNKSDA. Aswaja dimaknai sebagai seperangkat nilai etis dan moral yang bersumber dari ajaran Islam, sementara sosialisme diposisikan sebagai kerangka analisis dan praksis politik dalam memperjuangkan keadilan sosial-ekonomi serta pembebasan kaum *mustadh'afin*. Integrasi kedua pilar ini membentuk karakter perjuangan FNKSDA sebagai gerakan kelas yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, sekaligus menjadi perekat solidaritas di antara anggota dengan latar belakang keterlibatan yang beragam, baik sebagai pegiat maupun jama'ah.

Selain itu, sikap FNKSDA yang secara tegas menolak pendanaan dari pihak luar merupakan bagian dari strategi menjaga independensi organisasi. Independensi ini dipahami sebagai prasyarat penting agar organisasi tetap bebas dari intervensi kepentingan eksternal yang berpotensi menggeser arah dan tujuan perjuangan. Dengan demikian, pengkaderan, fondasi ideologis, dan prinsip kemandirian organisasi saling berkaitan dalam menopang keberlanjutan FNKSDA sebagai aktor *intermediary* yang memperjuangkan kepentingan masyarakat akar rumput.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, M. R., & Shintasari, R. (2016). Difabel, LSM dan Politik *Intermediary*: (Politik Advokasi LSM Sapda dalam menggoalkan Perda JAMKES Difabel Kota Yogyakarta). *Society*, 4(2), 15-26.
- ANGGRAENY, S. (2017). RELASI KUASA ANTAR AKTOR *INTERMEDIARY* DAN PEMERINTAH (Doctoral dissertation, FISIPOL UMY).
- Benredjem, I. (2019). *Psychological Solidity And Its Relation To The Organizational Commitment Of Teachers*

FNKSDA YOGYAKARTA SEBAGAI AKTOR *INTERMEDIARY*

(Membangun Soliditas Internal Organisasi)

(Hana Setyaningsih, Yudi Rusfiana, Agus Nurulsyam Suparman, Hendi Budiaman)

Of The Institute Of Science And Techniques Of Sports And Physical Activities At The University Of M'sila.

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=PViMtOnJlLcC>.
- Hairini, S. M., & Bakar, A. (2013). PKBI: Aktor Intermediary dan Gerakan Sosial Baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(3), 187-199.
- Ham, U., & Elan, T. (2024). Strategi Tamalaki Sultra Selama Dua Puluh Tahun Sebagai Aktor Intermediary. *Trajectories of Public Administration*, 1(1), 125-139.
- Himpunan Dokumen Hasil Musyawarah Nasional Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) III.
- IGI Aceh Timur. (2019). *Kilau Mutiara dari Jejak Inspirasi Guru*. Sukabumi: CV Jejak.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=3CNrUbTu6CsC>
- Nashirulhaq, M. (2017). *Perjuangan ekonomi-politik generasi muda Nahdlatul Ulama (NU): Studi atas Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- Putra, L. (2015). Politik Subaltern 'Strategi Vinolia Wakijo Sebagai Aktor Intermediary Dalam Merepresentasikan Waria dan Pengakuan Atas Gender Ketiga. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 1(1), 29-60.
- Rahmatullah, A. F., & Jabbar, Y. M. (2023). Transformasi Exalt To Creativity (XTC): Gerakan Sosial Baru, Aktor Intermediary, atau Politik Praktis?. *Jurnal PolGov*, 5(1), 197-236.
- Saidang, S., & Suparman, S. (2019). Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 122-126.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Tahir, Arifin. (2014). *Buku Ajar Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Widayati, A. (2019). Reaktualisasi Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Kedaulatan Sumber Daya Agraria (Studi Gerakan Demokrasi Radikal pada FNKSDA). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 84-98.